



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PIDATO KETUA BPK RI

**DALAM ACARA
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PUSAT (LKPP) TAHUN 2023 DAN IKHTISAR HASIL
PEMERIKSAAN SEMESTER (IHPS) II TAHUN 2023
KEPADA DPR RI**

JAKARTA, 4 JUNI 2024



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiasthu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

- **Yang Terhormat, Ketua DPR RI;**
- **Yang Terhormat, para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Yang Terhormat, Wakil Ketua dan para Anggota BPK RI;**
- **Yang Terhormat, para Anggota DPR RI; serta**
- **Hadirin yang saya hormati.**

Mengawali sambutan ini, perkenankan kami menghaturkan puji syukur kepada ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah kesehatan dan kesempatan, sehingga hari ini kami dapat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 sekaligus penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2023 (atau IHPS II 2023).

Pimpinan dan Para Anggota DPR serta Hadirin yang kami muliakan,

BPK telah menyelesaikan mandat pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023 yang mencakup pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang secara administratif telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden pada 31 Mei 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKBUN dan 80 LKKL, serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL.

Opini WDP atas empat LKKL tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2023 sehingga BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2023.

Pimpinan dan Para Anggota DPR serta Hadirin yang terhormat,

Pada LKPP Tahun 2023, BPK juga menyoroti aspek pengelolaan APBN yang perlu mendapatkan perhatian. Di sisi pendapatan, tercapainya target Penerimaan Pajak dan PNBPN masih perlu diikuti dengan upaya penagihan yang efektif dan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan.

Di sisi belanja, pengalokasian anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan yang menjadi mandat UUD 1945 perlu diikuti dengan efektivitas pelaksanaannya.

Hal ini sangatlah krusial untuk mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas serta menguatkan pondasi bagi keberlanjutan agenda pembangunan Sumber Daya Manusia guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Kemudian, berbagai bentuk belanja bantuan dan subsidi yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat harus terus dikawal agar penyalurannya dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Untuk itu, penyempurnaan kerangka regulasi, validasi dan *updating* basis data penerima manfaat, serta mekanisme dan kualitas pengawasan penyaluran bantuan maupun subsidi perlu terus ditingkatkan.

Pimpinan dan Anggota DPR serta Hadirin yang kami muliakan,

Pada kesempatan baik ini, kami sampaikan pula Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 atas 651 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri dari satu LHP Keuangan, 288 LHP Kinerja, dan 362 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

IHPS dimaksud juga mengungkapkan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK dari tahun 2005 hingga 2023, dengan tindak lanjut telah sesuai rekomendasi BPK sebesar 78,2%.

Untuk hasil pemeriksaan pada periode RPJMN 2020 hingga 2023, tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi baru mencapai 52,9%.

Dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 senilai Rp136,88 triliun dimana Rp21,87 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020 - 2023.

Pimpinan dan Anggota DPR yang terhormat,

IHPS II Tahun 2023 memuat **hasil pemeriksaan tematik** atas **dua prioritas nasional**, yakni pengembangan wilayah, serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Hasil **pemeriksaan atas prioritas nasional pengembangan wilayah** diantaranya mengungkapkan permasalahan:

1. Pengadaan dan penyaluran bantuan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian (alsintan) tahun 2022-2023 belum didukung hasil uji mutu dan ketidaktepatan sasaran penyaluran.
2. Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Maloy Batuta Trans Kalimantan belum merealisasikan pencapaian target, belum membangun, mengembangkan, dan mengelola prasarana serta belum didukung SDM yang memadai.

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,

Hasil **pemeriksaan atas revolusi mental dan pembangunan kebudayaan** diantaranya menunjukkan:

1. Pemerintah telah menerbitkan Pedoman Umum pelaksanaan Program Gerakan Nasional Revolusi Mental di tahun 2021 dan membentuk Gugus Tugas Nasional GNRM, namun pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian belum dilaksanakan secara berkesinambungan.

2. Dalam pelayanan ibadah haji, regulasi layanan akomodasi dan konsumsi, serta transportasi udara telah selaras, namun masih terdapat permasalahan mendasar, yakni pemerataan kesempatan, penerapan istithaah kesehatan dalam penetapan jamaah haji berangkat, dan penetapan biaya perjalanan ibadah haji yang belum optimal dalam mendukung keberlanjutan keuangan haji dan keberadilan.

Pimpinan dan Anggota DPR yang terhormat,

Selain hasil pemeriksaan atas prioritas nasional, IHPS ini juga memuat hasil pemeriksaan yang menunjukkan permasalahan antara lain:

1. Pada **pemeriksaan kinerja efektivitas perlindungan WNI dan kerja sama dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**, perjanjian kerja sama Pemerintah RI dengan Pemerintah negara-negara di Asia Tenggara belum mencakup peningkatan kapasitas penanganan korban TPPO.

2. Pada **pemeriksaan kinerja aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan**, ditemukan ketidakselarasan regulasi pengelolaan pemungutan PNPB perdagangan karbon, dan kewajiban pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang belum terpenuhi.
3. Pada **pemeriksaan pengelolaan pendapatan dan belanja kementerian dan lembaga**, ditemukan bantuan keluarga penerima manfaat yang tidak bertransaksi senilai Rp208,52 miliar belum dikembalikan ke kas negara, serta kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp166,27 miliar dan USD153,22 ribu yang disebabkan pelaksanaan Belanja Modal Tahun 2022 dan Semester I TA 2023 tidak sesuai ketentuan.
4. Pada **pemeriksaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dan badan lainnya**, ditemukan antara lain PT Indofarma Tbk dan PT IGM (anak perusahaan PT Indofarma Tbk) melakukan pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan *customer*, sehingga mengakibatkan potensi kerugian sebesar Rp146,57 miliar

yang terdiri dari piutang macet sebesar Rp122,93 miliar dan persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar.

Pimpinan dan Para Anggota DPR serta Hadirin yang berbahagia,

Perkenankan kami, atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI atas sinergi yang telah terjalin, sehingga BPK dapat mengoptimalkan pelaksanaan mandatnya, sebagai lembaga pemeriksa eksternal Pemerintah yang bebas dan mandiri, dalam mengawal pengelolaan keuangan negara.

Sinergi tersebut juga perlu terus ditingkatkan dalam menghadapi berbagai perkembangan dinamika, baik di tataran nasional maupun global, yang akan menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan APBN di masa mendatang.

Kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi dan memberkahi seluruh langkah dan upaya kita dalam

membangun bangsa dan negara Indonesia. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Wabilahittaufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Om Shanti Shanti Shanti Om

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua**

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.